

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN TINDAKAN REPRESIF APARAT TERHADAP WARGA PENOLAK PEMBANGUNAN NYIA DI KORAN KR DAN HARJO

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF APPARATUS'S REPRESIVE ACTIVITIES OF NYIA DEVELOPMENT REPELLENTS IN KR AND HARJO NEWSPAPER

Oleh: Yasyfi Kunsuhuan Adi, 14419144037, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
kunsuhuan.adi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi dan kuasa di balik pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak pembangunan NYIA di koran *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja*. Objek penelitian ini adalah berita pada *KR* dan *Harjo* yang memuat konflik NYIA selama kurun waktu 25 November 2017 – 25 Januari 2018. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis model Michel Foucault. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah konstruksi *KR* pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak NYIA memihak pada stakeholder, porsi pemberitaan terhadap stakeholder lebih dominan dan memberikan ruang sempit bagi warga penolak NYIA untuk menyuarakan apa yang dialami oleh mereka. Hal ini dikarenakan *KR* merupakan relasi kuasa yang dimiliki oleh penguasa saat ini. Jaringan kekuasaan tersebut menjadikan *KR* corong bagi penguasa termasuk memberitakan dan menyebarkan wacana milik penguasa. Sedangkan konstruksi pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak pada koran *Harjo* condong terhadap warga penolak pembangunan NYIA jika dibandingkan dengan *KR*. Hal ini disebabkan *Harjo* sebagai media massa lokal baru dan alternatif yang tidak terikat dengan jaringan kekuasaan. Selain itu *Harjo* memunculkan wacana alternatif selain wacana bentukan penguasa kepada khalayak.

Kata kunci: analisis wacana kritis, represif, koran, michel foucault, NYIA

ABSTRACT

This research was aimed to describe the construction and power behind the reports of repressive apparatus to New Yogyakarta International Airport (NYIA) repellent in the KR and Harjo newspaper. The object of research in this study was the reports or news on the KR and Harjo during NYIA conflict around 25th of November 2017 until 25th of January 2018. The method of this research was qualitative with critical discourse analysis technique of Michel Foucault. The conclusion of this research was the construction of KR to report the repressive action to NYIA repellents are siding with stakeholders. The portions of reporting stakeholders side were more dominant than NYIA repellents. It was because KR is related to the ruling authority. The power of business network made KR funnel for authority including preach and spread discourse belongs to authority. While the construction of reporting repressive action of apparatus to the repellents in the newspaper, Harjo inclined to the repellents of NYIA development if compared with KR. It was because Harjo is as a new and alternative local mass media that isn't bound with business network. Beside, Harjo bring up alternative discourse formation authority to audience.

Keywords: critical discourse analysis, repressive, newspaper, Michel Foucault, NYIA

PENDAHULUAN

Proyek pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam situs resminya, merupakan proyek bandara berskala internasional yang ditangani oleh PT. Angkasa Pura I. Ditargetkan beroperasi pada tahun 2020. Rencananya, bandara tersebut memiliki daya tampung sekitar 14 juta penumpang pertahun. Selain itu, daya tampung pesawat sebanyak 28 buah serta memiliki landasan pacu seluas 3.250 m².

Hingga kini, pembangunan NYIA masih menimbulkan polemik di masyarakat. Akibatnya muncul dua perbedaan pendapat dalam wacana NYIA, yaitu kelompok pro pembangunan dan kelompok kontra atau penolak pembangunan NYIA. Kelompok pro terhadap pembangunan NYIA terdiri dari penguasa, pemerintah pusat (beserta menteri-menteri kabinetnya), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pengembang NYIA (PT AP I) yang didukung dengan alat dan aparaturnegara. Kelompok kontra NYIA terdiri dari warga penolak NYIA dengan didukung oleh para aktivis penolak NYIA. Masing-masing berargumen mengenai dampak yang ditimbulkan. Pihak pro pembangunan beralasan bahwa pembangunan NYIA bermanfaat untuk menampung kuota penumpang pesawat di Bandara Adi Sucipto yang *overload*. Selain itu pembangunan NYIA dapat mendongkrak *investasi* dan serapan tenaga kerja bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo (Harjo, *Investasi DIY Masih Rendah*. Minggu 17 Desember 2017).

Namun, pihak kontra berpendapat bahwa pembangunan bandara juga memiliki dampak negatif. Diantaranya dampak ekonomi dan lingkungan. Dari segi lingkungan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam situs resminya menjelaskan bahwa lokasi pembangunan NYIA berada pada kawasan yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Temuan ini juga menguatkan dampak ekonomi pembangunan Bandara NYIA, akan menyingkirkan lahan pertanian subur di Temon, Kulon Progo.

Berbagai macam cara digunakan *stakeholder* untuk menuntaskan masalah pembebasan lahan dalam pembangunan NYIA. Salah satunya adalah tindakan represif. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh aparat negara. Menurut Althusser (2015: 19) aparaturnegara

memiliki kekuatan intervensi dan pelaksana represi untuk *kepentingan kelas yang berkuasa*, dalam perjuangan kelas yang dilakukan oleh *borjuasi* dan sekuatnya melawan proletariat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Althusser (2015: 24) yang menyebut aparaturnegara sebagai aparaturnegara represi negara (*repressive state apparatus*). Sebutan tersebut berarti aparaturnegara melaksanakan tugasnya dengan kekerasan. Kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga non-fisik seperti represi administrasi, ekonomi dan sebagainya.

Pernyataan Althusser sejalan dengan yang terjadi dalam polemik pembangunan NYIA. Dalam pelaksanaannya ditemukan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara dengan *titah* kepentingan negara. Contoh, ancaman penggusuran paksa (*Kedaulatan Rakyat*, "Tak Diindahkannya, AP I Akan Gusur Paksa", Senin 27 November 2017), pengosongan rumah dan pemadaman listrik warga penolak (*Kedaulatan Rakyat*, "Lahan Calon Bandara Dikosongkan" 28 November 2017), penangkapan terhadap aktivis penolak pembangunan NYIA (Harjo, "Pemkab Sayangkan Penolakan Warga" Sabtu 16 Desember 2017), hingga penganiayaan seperti pemukulan, penjambakan, pengeroyokan, cemooh dan provokasi kepada warga penolak pembangunan bandara (Harjo, "AP I Hentikan Sementara Land Clearing" Kamis 11 Januari 2018).

Bill Kovach (2001 :12) menyebutkan bahwa jurnalisisme harus memberitakan kebenaran dan loyal kepada warga. Hal itu yang seharusnya menjadi patokan bagi media untuk bekerja dan beretika. Media wajib memberitakan kebenaran dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi tanpa menutupinya. Selain itu, media juga wajib untuk berpihak kepada rakyat.

Namun, realitanya media dimanfaatkan oleh pihak tertentu, terutama penguasa dan pemodal untuk menebar wacana mereka. Media merupakan tempat untuk menebarkan wacana yang dimiliki oleh penguasa. Wacana menurut Foucault (2002: 23) digunakan untuk mengkonstruksi pemaknaan dan pola pikir dominan, lalu memberangus pola pikir alternatif pada suatu periode. Akibatnya terbentuklah relasi kekuasaan antara media dan penguasa. Relasi kekuasaan tersebut memainkan peran untuk mengkondisikan

wacana publik agar dapat dikendalikan oleh penguasa. Althusser juga menyebut media sebagai bagian dari aparaturnya ideologi negara (*ideology state apparatus*) karena media merupakan badan atau institusi yang dimiliki oleh penguasa untuk menyebarkan nilai-nilai yang dianggap benar oleh penguasa (Althusser, 2015: 24-26).

Hal ini diperkuat dengan sejumlah penelitian yang membahas praktik kekuasaan dalam media untuk mengkonstruksi wacana di ruang publik seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaka Putra Ramdani yang berjudul *Konstruksi Media Lokal Terhadap Pemberitaan Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo*. Hasil penelitian ini adalah konstruksi pemberitaan pembangunan bandara pada SKH KR dan SK Harjo. Teks berita di SKH KR mengkonstruksikan bahwa pembangunan bandara akan bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan teks berita Harjo mengkonstruksikan pembangunan bandara di Kecamatan Temon merugikan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang rencana pembangunan bandara.

Analisis wacana kritis memiliki beberapa pendekatan analisis, salah satunya model Michel Foucault. Model Michel Foucault merupakan model kembangan dari Genealogi Michel Foucault. Model Genealogi tersebut lantas dikembangkan oleh para Foucauldian untuk menganalisis teks wacana. Model ini terdiri dari enam langkah: (1) seleksi topik berita; (2) pendalaman dan pemahaman data; (3) identifikasi tema, kategori dan objek wacana; (4) penemuan unsur-unsur yang *absen* dan *diabaikan*; (5) relasi makna antar wacana; dan (6) kontekstualisasi wacana (Jean Carabine dalam Wetherell, et al., 2001: 281).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Analisis Wacana Kritis menerapkan paradigma kritis terhadap bahasa. Untuk menyelidiki praktik penggunaan bahasa yang saling bertarung perlu mengetahui karakteristik analisis wacana kritis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Eriyanto (2011: 7-13) sebagai berikut.

1. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Pemahaman ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana dapat

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti persuasif, sanggahan, dukungan dan lain sebagainya atau dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang diekspresikan diluar kesadaran.

2. Konteks

Guy Cook (Badara. 2014) menyebutkan ada tiga hal sentral dalam wacana yaitu teks, konteks dan wacana. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di atas kertas, namun semua bentuk komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan sebagainya. Wacana kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersamaan. Yang menjadi perhatian disini adalah analisis wacana kritis menjelaskan secara gamblang teks dan konteks secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi.

3. Historis

Pemahaman wacana dapat dimengerti jika melibatkan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting dalam pemahaman wacana adalah menghubungkan wacana tersebut dengan konteks historis tertentu. Misalnya, analisis wacana teks berita ketika runtuhnya orde lama ke orde baru atau bisa juga dari orde baru ke masa reformasi. Pemahaman mengenai wacana teks tersebut hanya dapat diperoleh jika memberikan konteks kesejarahan ketika teks tersebut dibuat.

4. Kekuasaan

Kekuasaan memiliki sifat kontrol, kontrol disini tidak harus selalu dilihat sebagai secara fisik dan langsung, tetapi kontrol juga berlaku secara mental dan psikis. Satu orang penguasa, atau kelompok dominan mengatur orang lain melalui wacana. Kelompok dominan disini merujuk pada negara, agama dominan, ideologi yang dominan, suku mayoritas dan lain sebagainya. Kelompok mayoritas dan dominan mungkin membuat kelompok lain bertindak seperti yang diinginkan olehnya, berbicara dan menulis, berpikir dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh kelompok dominan.

5. Ideologi

Hal yang perlu digarisbawahi dari definisi ideologi adalah pembentukan kesadaran kepada masyarakat untuk mematuhi

mayoritas dan sang penguasa. Ideologi dari kelompok dominasi dan mayoritas akan diterima jika masyarakat menganggap sebagai benar dan wajar. Jika dihubungkan dengan praktik wacana, ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan, praktik individu, dan anggota suatu kelompok. Ideologi dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi didalam kelompok. Oleh karena itu dalam analisis wacana kritis perlu melihat bagaimana ideologi dan kelompok-kelompok yang ada berperan dalam membentuk wacana.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault dalam penelitian ini mengambil enam tahapan dari sebelas tahapan tersebut yakni: (1) seleksi topik berita; (2) pendalaman dan pemahaman data; (3) identifikasi tema, kategori dan objek wacana; (4) penemuan unsur-unsur yang *absen* dan *diabaikan*; (5) relasi makna antar wacana; dan (6) kontekstualisasi unsur wacana (Jean Carabine dalam Wetherell, et al., 2001: 281).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak Bandara NYIA, sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk melakukan penelitian. Penelitian akan dilaksanakan selama sebulan yakni mulai 9 Juni 2018 sampai dengan 9 Juli 2018.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berita pada Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* dan Surat Kabar *Harian Jogja* edisi 25 November 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 yang memberitakan NYIA. Dipilih pada edisi tersebut karena pada periode tersebut terjadi beberapa tindakan represif aparat kepada warga penolak NYIA, seperti pengosongan paksa lahan, pemutusan aliran listrik, penangkapan para aktivis penolak NYIA.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *coding*. Menurut Saldana (2009:3) kode dalam penelitian kualitatif adalah kata atau frasa pendek yang secara simbolis meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu data-data tersebut bisa berupa bahasa atau visual. Adapun langkah pengumpulan data pada

penelitian ini diawali dengan memilih berita-berita yang mengandung unsur-unsur tindakan represif aparat. Setelah dipilih, berita yang memuat tindakan represif aparat dipilih. Kemudian membagi data menurut topik yaitu tindakan represif aparat. Langkah terakhir adalah mengelompokkan topik tindakan represif aparat tersebut kedalam kategori data yaitu keberpihakan pemberitaan.

E. Cek Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan cek terhadap data primer dan sekunder sehingga dapat memberikan deskripsi data yang tepat dan sistematis tentang permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga harus meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi literatur buku, jurnal penelitian, serta berita dan artikel yang relevan dengan terkait dengan temuan yang diteliti. Semakin tekun membaca, maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga dapat digunakan untuk menemukan data yang sesuai dan memeriksa kebenaran data temuan tersebut.

Sedangkan triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono. 2014: 273). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data dengan menggunakan lebih dari satu teknik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, sebab penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi pustaka untuk mengecek data yang dianalisis.

F. Teknik Analisis Data

Tahapan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault diawali dengan seleksi topik berita yang akan diteliti, jenis berita dapat berupa berita pada media cetak, yaitu *SKH Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja*. Setelah menyeleksi topik berita, langkah selanjutnya mendalami dan memahami data. Data yang diteliti dapat berupa berita, artikel, jurnal ataupun buku yang relevan dengan topik yang ingin diteliti. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tema, kategori, dan objek wacana. Hal ini dilakukan dengan *coding* untuk mempermudah proses interpretasi data yang telah didapatkan sekaligus sebagai sistem pengelompokan data.

Setelah penentuan tema, kategori, dan objek wacana, perlu mencari dan menemukan unsur-unsur yang absen dan diabaikan pada berita di *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja* untuk menemukan data yang lebih dalam dan menguak *episteme* dalam berita. Setelah itu,

menghubungkan relasi-relasi makna yang terdapat pada berita. Langkah terakhir adalah mengkorelasikan antara wacana-wacana pada berita dengan konteks-konteks yang didapat dari berita di *SKH Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Seleksi Topik Berita

Wacana NYIA oleh KR dan Harjo pada periode 25 November 2017 sampai 25 Januari 2018 memuat beberapa topik. *Pertama*, tindakan represif aparat terhadap warga penolak pembangunan NYIA. *Kedua*, percepatan pembangunan NYIA. *Ketiga*, upaya pendekatan persuasif pemangku kepentingan. Topik yang dipilih dan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak represif aparat terhadap warga penolak pembangunan NYIA. Jumlah berita yang memuat wacana NYIA terkumpul sejumlah 72 berita yang terdiri dari 28 berita di SKH KR dan 44 berita pada *Harian Jogja*. Setelah melalui seleksi berita terdapat 41 berita yang terdiri 16 berita di SKH Kedaulatan Rakyat 25 berita di *Harian Jogja* yang memuat topik berita tindakan represif aparat negara terhadap warga penolak.

Menurut International Civil Aviation Organization (ICAO) organisasi penerbangan sipil di bawah PBB, bahwa dalam pembangunan bandara tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan dan melanggar HAM dalam proses pembangunan bandara. Hal tersebut diungkapkan oleh M. Chairul Anam Komisioner Komnas HAM.

“Salah satu syarat membangun bandara internasional di suatu negara sesuai peraturan ICAO tidak boleh melanggar HAM” (KR, 18 Desember 2017).

Menurut Anam, pembangunan bandara akan tercederai oleh aksi kekerasan yang terjadi apabila tak segera dicegah. Pembangunan NYIA akan percuma apabila memaksakan proses yang cepat dengan target cepat beroperasi tapi mengesampingkan permasalahan kemanusiaan yang ada di lapangan. “Semua harus tahu, poin penting di balik proyek pembangunan infrastruktur tidak boleh melanggar HAM,” kata Anam, Jum’at malam. (Harjo, 18 Desember 2017)

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara diantaranya adalah kekerasan fisik, penggusuran paksa, tindakan tidak senonoh, dan pemadaman listrik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh warga penolak bandara.

- *Fajar Ahmadi, warga penolak pembangunan NYIA*

Salah satu warga penolak yang rumahnya sudah dibongkar, Fajar Ahmadi menuturkan, PT AP I telah menggunakan alat berat untuk merobohkan tanaman dan memotong akses jalan menuju rumahnya. Selain itu ada tiga pintu dan 11 daun jendela yang sudah dicongkel serta dilepas paksa. Ia menyayangkan sikap PT AP I beserta aparat kepolisian, PT PLN dan Pemkab Kulonprogo yang tetap melakukan penggusuran. Menurut dia, penggusuran itu tidak sepatutnya dilakukan kepada warga yang menolak menjual lahan mereka. Padahal ia berharap agar aparat tak bertindak sewenang-wenang (Harjo, 29 November 2017).

- *Martono, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT)*

“AP I terburu-buru mengeluarkan surat peringatan (SP) pengosongan lahan hingga tiga kali kepada anggota WTT pada gelombang pertama pengosongan lahan dan banunan rumah, hal itu dilanjutkan dengan keputusan aliran listrik sehingga warga mau tidak mau harus pindah rumah.” (KR, 22 Desember 2017).

- *Tim Kuasa Hukum Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP), Teguh Purnomo, menyayangkan tindakan aparat yang seharusnya mengamankan kedua belah pihak, namun justru melakukan penganiayaan. “Kami sudah menyiapkan sejumlah foto dan video sebagai bukti laporan,” katanya kepada wartawan kemarin. Beberapa tindakan penganiayaan itu antara lain adalah pemukulan, penjambakan, dan pengeroyokan. Ada juga teriakan yang tidak senonoh, cemooh dan provokasi yang dilakukan aparat kepada warga. “Contohnya ada polisi yang mengacungkan jari tengah termasuk kepada warga perempuan,” kata dia. (Harjo, 11 Januari 2018)*

Pihak pro pembangunan yaitu pemerintah dan PT AP I selaku pelaksana pembangunan beralasan bahwa tindakan represif yang berupa pengosongan paksa lahan untuk kepentingan pembangunan bandara meskipun warga masih menolak.

Didik Tjatur selaku sekretaris Proyek NYIA PT AP I juga mengungkapkan bahwa "Kami belum bisa memastikan kapan pelaksanaan penggusuran paksa. Prinsipnya kalau cara persuasif tidak bisa maka bangunannya dirobuhkan. Tapi teknis pelaksanaannya masih akan kami rapatkan".

Manajer Proyek Pembangunan NYIA PT AP I, Sujiastono berharap warga bisa segera pindah keluar dari lahan pembangunan bandara, PT AP I tetap akan melakukan pembersihan lahan secara menyeluruh, meski ada warga yang masih menolak. Menurut dia, mau tidak mau, warga tetap harus menerima keputusan dan harus segera pindah, karena semua bangunan dan pepohonan yang ada di atas lahan akan dibersihkan untuk kepentingan pembangunan bandara. (Harjo, 5 Desember 2017)

Secara gamblang pihak aparat yang bertanggung jawab dalam pengamanan proses *land clearing* dan pengosongan paksa lahan mengakui adanya anggota polisi yang melakukan tindakan represif.

Kompil Dedi Suryadharna, Wakapolres Kulonprogo,

"Tidak semua anggota (polisi) mampu mengontrol kondisi emosional mereka masing-masing, terlebih dalam suasana ricuh seperti saat demonstrasi warga berlangsung. Saya minta maaf," ucapnya. (Harjo, 11 Januari 2018).

Terkait tindakan represif aparat dan keberadaan warga penolak pembangunan NYIA pimpinan struktural tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur memilih untuk melempar dan menyerahkan polemik tersebut kepada pihak penyelenggara yaitu PT AP I dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Sri Sultan juga menyesalkan adanya warga penolak pembangunan NYIA.

Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Sultan, tanggung jawab pengosongan lahan berada di tangan PT

AP I. pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan. Apalagi warga juga sudah diberikan waktu dan kompensasi uang ganti rugi.

"Mosok apa-apa kudu dipekso." (KR, 4 Desember 2017)

Sri Sultan HB IX mengungkapkan, proses pengosongan lahan sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi PT Angkasa Pura I. di sisi lain, dia pun merasa warga sudah diberikan waktu yang cukup untuk pindah. Warga juga sudah mendapatkan kompensasi atau dana ganti rugi sehingga urusan pembebasan lahan bisa dibilang sudah selesai. (Harjo, 4 Desember 2017)

"Masak apa-apa kudu dipekso (masa apa-apa harus dipaksa)," kata Sri Sultan HB IX usai mengunjungi pengungsian korban banjir di Panjatan, Kulonprogo, Sabtu (2/12). (Harjo, 4 Desember 2017)

Adapun Pemda DIY belum akan terjun langsung untuk menangani perlawanan penolak bandara. Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan masih mempercayakan permasalahan ini kepada Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan PT Angkasa Pura I. "Biar diselesaikan Pemkab Kulonprogo dulu dan Angkasa Pura," ujar Sultan. (Harjo, 16 Januari 2018)

2. Pendalaman dan Pemahaman Data

Pendalaman dan pemahaman data pada penelitian ini dilakukan dengan memahami data pada berita di SKH *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja* edisi 25 November 2017-25 Januari 2018 yang kemudian direkap melalui koding. Berdasarkan pendalaman dan pemahaman data yang diperoleh melalui proses koding, terdapat beberapa temuan yang penting dalam penelitian ini. Di SKH *Kedaulatan Rakyat* jumlah kemunculan aktor dari instansi atau lembaga pemerintahan sebanyak 12 kali; PT. Angkasa Pura I 16 kali; warga pendukung pembangunan NYIA 4 kali, warga penolak pembangunan NYIA 6 kali, netral sebanyak 6 kali. Sedangkan *Harian Jogja*, jumlah kemunculan aktor dari instansi atau lembaga pemerintahan sebanyak 24 kali; PT. Angkasa Pura I sebanyak 28 kali; PT PP sebanyak 1 kali; warga pendukung 6 kali; warga penolak pembangunan NYIA 24 kali, netral 4 kali.

Sumber-sumber berita untuk pendalaman data pada penelitian ini adalah *Anggota Komisi III DPR: Penangkapan Aktivis Penolak Bandara Kulon Progo Pakai Cara Orba*. (Tirto, 5 Desember 2017), *Usaha Pengosongan Lahan Bandara Kulon Progo Kembali Ricuh* (Tirto, 8 Januari 2018).

3. Identifikasi Tema Wacana

Identifikasi tema terhadap teks-teks berita yang telah dilakukan, menghasilkan tiga tema yakni disiplin, normalisasi dan kontrol. Ketiga tema tersebut merupakan mekanisme bagi kekuasaan untuk bekerja. Kekuasaan bekerja dengan serangkaian mekanisme kekuasaan, diantaranya adalah disiplin, normalisasi dan kontrol (Eriyanto. 2011: 69-71).

a. Disiplin

Disiplin artinya aturan, prosedur, jadwal, pelaksanaan dan tujuan kegiatan yang menghasilkan kegiatan. Pembangunan NYIA yang dilakukan oleh pengembang melalui alat negara memberlakukan aturan, prosedur, jadwal, pelaksanaan dan tujuan pembangunan NYIA kepada warga terdampak, khususnya warga terdampak. Selama 25 November 2017 – 25 Januari 2018 aturan dan jadwal yang dilakukan oleh *stakeholder* berupa pemberian SP III kepada warga penolak yang masih bertahan di daerah terdampak.

Sekretaris Proyek NYIA PT AP I, Didik Tjatur mengatakan jajarannya sudah melayangkan surat peringatan kepada wargayang telah menerima putusan. Konsinyasi dan pemutusan hak atas tanah dan asset. SP III itu dikirimkan kepada masing-masing warga ke rumah mereka. "Jika masih belum mau pindah setelah SP III dilayangkan akan nada arah kesana (penggusuran). Kami adakan rapat pelaksanaan pengosongan dengan pihak terkait, seperti PT PLN, kepolisian maupun perangkat desa," ujarnya, Jumat (24/11).

Proses pembangunan NYIA yang telah berlangsung di percepatan dan ditargetkan untuk selesai pada 2019. Target dan jadwal pembangunan NYIA merupakan mekanisme kekuasaan untuk mengikuti tujuan presiden, yakni beroperasi pada April 2019.

Sujiastono menilai proses land clearing yang dilakukan petugas selama dua hari yakni Snin-Selasa (8-9/1) bias menyelesaikan 23 bidang lahan yang

sudah berstatus penetapan cukup cepat. Pihaknya mengimbau warga yang hingga saat ini belum sepakat pembangunan bandara untuk sadar. "pelaksanaan land clearing kami lakukan supaya tidak ada hambatan di lapangan. Setelah pohon dan bangunan dirobohkan, kami melakukan pemberihan lahan. Kami sangat berharap ke depan sudah tidak ada gangguan lagi, karena bagaimana pun program pembangunan strategis nasional ini akan tetap jalan dan hak-hak masyarakat juga sudah dipenuhi oleh Negara." (KR, 10 Januari 2018)

b. Normalisasi

Normalisasi merupakan bentuk pemisahan antara individu atau kelompok satu dengan yang lainnya karena tidak sesuai dengan norma dan sistem yang dijalankan oleh penguasa (Foucault. 2016: 104). Dampaknya adalah individu atau kelompok yang berbeda pandangan dan tidak patuh akan disisihkan, disalahkan dan diperlakukan berbeda oleh penguasa dan relasi kuasanya.

AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo) Polres Kulon Progo mengimbau para aktivis tidak lagi mengikuti kegiatan sejenis. Jika hendak menyampaikan aspirasi, sesuai aturan undang-undang kebebasan menyampaikan aspirasi atau pendapat, sebelumnya harus ada pemberitahuan atau izin. "Setelah kami data, cek kesehatan dan dimintai keterangan dengan seijin Kapolda, mereka kami lepas tadi malam sekitar pukul 20.30." Dalam kegiatan kemarin tidak ada izin sehingga perlu tindakan tegas namun terukur. Jangan sampai ada penyusup tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi, memutar balik fakta seolah-olah polisi melakukan tindakan kekerasan (KR, 17 Desember 2017)

Tidak hanya penangkapan dan pengamanan, normalisasi juga terjadi dengan bentuk pilih kasih antara kelompok pendukung NYIA dan kelompok penolak NYIA. Salah satu contoh pilih kasih antara kelompok pendukung NYIA dan kelompok penolak terjadi ketika kedua kelompok tersebut melakukan aksi demonstran di tempat dan waktu yang berbeda. Kelompok penolak NYIA yang diwakili oleh aktivis melakukan aksi pada Sabtu, 9 Desember 2017. Dalam aksi tersebut aktivis tidak dapat menemui perwakilan dari PT AP I selaku

penanggungjawab proyek NYIA dengan dalih hari libur dan mengajukan surat kepada pihak kepolisian dan PT AP I.

- *Kapolsek Depok Timur, Novita Eka Sari mengklaim, tidak ada izin dan pemberitahuan yang diajukan terkait dengan rencana aksi tersebut. Karenanya kata dia, perwakilan PT Angkasa Pura I kesulitan mendatangkan jajaran pimpinan untuk menemui pengunjuk rasa karena aksi dilakukan di hari libur kerja. (Harjo, 10 Desember 2017).*

- *Communication & Legal Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Adisujipto Liza Anindya Rahmadiani, menyatakan, pengunjuk rasa bisa bertemu pimpinan dengan mengajukan audiensi di hari kerja." Silakan disampaikan secara resmi permohonan audiensi, pasti kami terima nanti tinggal disampaikan aspirasinya," ujarnya. (Harjo, 10 Desember 2017).*

Menurut pihak aktivis, PT AP I tidak pernah mendengarkan permintaan dari kelompok penolak NYIA termasuk dari para aktivis.

Juru bicara ATB Ilias Husain mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa selama ini tidak pernah digubris otoritas PT AP I. "Kami cukup kesal karena selama ini tidak diindahkan permintaan kami." Katanya di sela-sela aksi, Sabtu.

Tidak lama berselang (Senin, 11 Desember 2017) pihak pendukung pembangunan NYIA juga melakukan aksi demonstrasi di daerah calon lahan NYIA. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bintang Selatan (GBS) melakukan aksi demonstran yang bertujuan untuk menyatakan dukungan kepada PT AP I untuk percepatan pembangunan NYIA.

Tony Hary Prasetyo (Penasihat GBS) Kedatangan kelompok pendukung bandara tersebut disambut langsung oleh General Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I R. Sujiastono. Selain berorasi menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan sarana transportasi baru di Temon, anggota GBS juga membawa dan membentangkan spanduk yang intinya mendesak PT AP I dan mitra usahanya PT PP untuk tetap melakukan percepatan Pembangunan NYIA demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan wilayah Kulon Progo. (KR, 12 Desember 2017)

Namun, perlakuan PT AP I kepada warga pendukung pembangunan NYIA berbeda jika dibandingkan dengan kelompok penolak pembangunan NYIA. Pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis penolak bandara yang dilakukan beberapa waktu lalu (Sabtu, 9 Desember 2017) pihak PT AP I tidak digubris dan tidak diindahkan serta tidak menemui para aktivis penolak NYIA. Pada aksi demonstrasi GBS, pihak AP I yang wakili oleh Sujiastono selaku Manajer Proyek Pembangunan NYIA PT AP I menyambut dan menerima dengan baik kedatangan mereka.

"Kami pastikan pembangunan NYIA tetap jalan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Kami tidak menunda-nunda pekerjaan, sejumlah proses masih terus dilakukan agar bandara beroperasi sesuai target April 2019." (KR, 12 Desember 2017)

"Kami tidak menunda-nunda, berbagai tahapan dan proses masih terus kami lakukan agar bandara beroperasi sesuai dengan target, yakni April 2019," ujarnya. (Harjo, 12 Desember 2017)

Selain itu GBS juga melakukan penyisiran terhadap kelompok penolak NYIA khususnya mahasiswa, untuk melihat identitas mereka. Gendut menyalahkan para aktivis penolak NYIA karena pembangunan NYIA terhambat oleh gerakan tolak NYIA. Dia menilai gerakan penolakan tersebut mencederai harkat dan martabat Kulonprogo. Sebagai negara hukum, sebenarnya GBS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyisiran kepada para aktivis. Jaringan kekuasaanlah yang membuat GB berani untuk mengambil tindakan tersebut.

- *Sementara ketua GBS Minarto alias Gendut sempat mengajak massa melakukan penyisiran terhadap mahasiswa untuk membuktikan apakah mereka ber KTP Kulon Progo atau tidak. (KR, 12 Desember 2017)*

- *Ketua GBS, Gendut Minarto menuturkan, setelah turunnya peraturan Presiden No.98/2017 tentang Percepatan Pembangunan NYIA, proses pembangunan Bandar di Kabupaten Kulonprogo seharusnya dapat berjalan dengan lancar. Namun pembangunan terhambat menyusul munculnya gerakan yang dilakukan oleh segelintir orang dari luar Kulonprogo bahkan dari luar Jogja. Mereka mnyuarakan penolakan pengosongan*

lahan yang akan dijadikan lahan lokasi pembangunan NYIA. Gerakan itu dinilai GBS telah mencedarari harkat dan martabat warga Kulonprogo. (Harjo, 12 Desember 2017)

c. Kontrol

Kontrol bermakna memberi ganjaran bagi yang mengikuti dan memberikan hukuman bagi yang melanggar, sehingga setiap individu berusaha untuk mematuhi aturan-aturan dari penguasa. Setelah memberikan aturan dan jadwal pembangunan NYIA melalui SP maka langkah lanjut dari hal tersebut adalah pengusuran paksa dan *land clearing* diatas tanah mereka. Pengusuran paksa dan *land clearing* merupakan hukuman bagi warga penolak yang menolak untuk memberikan tanahnya untuk pembangunan NYIA. Menurut Foucault hal tersebut merupakan mekanisme dari kontrol penguasa.

- Didik Tjatur (Sekretaris Proyek NYIA PT AP I)

Didik mengakui ada beberapa warga yang bidang tanahnya dikonsinyasi menolak menerima surat peringatn tersebut. Tapi pihaknya tidak mau tahu dan menitipkan surat kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada warga bersangkutan. Kosinyasi diikuti pelepasan hak sehingga memiliki ketetapan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu warga diharapkan mematuhihnya sehingga segera meninggalkan lahan. (KR, 27 November 2017)

- Sujiastono (Manajer Proyek Pembangunan NYIA PT AP I)

“Sebenarnya kami telah melakukan perpanjangan waktu tiga hari dari batas akhir pengosongan lahan yang sudah dikonsinyasi, yakni pada 24 November lalu. Jadi 24 November kemarin mestinya lahan dan rumah sudah dikosongkan, tapi sampai kami beri tengat waktu tiga hari ternyata warga masih tetap bertahan. Sehingga tidak ada pilihan bagi kami selain melakukan pengosongan secara paksa karena proses pembangunan bandara harus tetap jalan.” (KR, 28 November 2017)

- Ir.RM. Astungkoro (Sekda Kulon Progo)

“Masalah itu (pengosongan lahan-Red) kan sudah disampaikan. Lahan harus kosong.” (KR, 4 Desember 2017)

- Sujiastono / Pimpinan Proyek NYIA PT AP I

Menurut dia, apabila warga terus bersikukuh menolak pindah dari urmah mereka, hal itu akan merugikan mereka sendiri. Palsanya, ketika pembangunan fisik NYIA dimulai, warga akan terganggu dengan debu kegiatan proyek, aktivitas laot berat dan tukang dengan pindah, mereka bisa beraktivitas lebih baik dan menggunakan uang konsinyasi untuk keperluan mereka. Ketika konsinyasi diputus pengadilan, maka nantinya warga juga akan mengalami kerugian, emngingat warga penolak hanya akan mendapat uang ganti rugi untuk lahan saja, tidak dengan bangunan dan tanaman. (Harjo, 6 Desember 2017)

Pengosongan paksa melibatkan aparaturnegara, hal ini dikarenakan pihak warga penolak yang tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya.

AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon progo) Adanya aksi massa penolak pembangunan bandara tidak mengganggu tahapan pembersihan lahan atau *land clearing*. Sebanyak 264 personel meliputi unsur dari anggota Polres Kulonprogo, Brimob, Kodim, Radar Congot dan Satpol PP Kulon Progo diterjunkan, mengamankan pekerjaan merobohkan rumah dan pepohonan di pekarangan. (KR, 5 Desember 2017)

Kontrol juga dilakukan dengan melibatkan PLN. Sebagai isntiusi negara PLN mendukung disiplin yang dijalankan oleh negara dan memutus aliran listrik sebagai kontrol akibat warga penolak yang masih mendiami kediaman mereka.

Martono / Ketua WTT (Wahana Tri Tunggal)

“AP I terburu-buru mengeluarkan surat peringatan (SP) pengosongan lahan hingga tiga kali kepada anggota WTT pada gelombang pertama pengosongan lahan dan banunan rumah, hal itu dilanjutkan dengan pemutusan aliran listrik sehingga warga mau tidak mau harus pindah rumah.” (KR, 22 Desember 2017)

4. Unsur-unsur yang Absen dan Terselubung

a. Tindak represif aparat selama proses pembangunan NYIA

Pertama, ketika proses pengosongan lahan pada 27 November 2017. Dalam memberitakan tindakan represif ketika proses pengosongan lahan pada tanggal 27 November 2017, SKH KR dalam judul beritanya tentang NYIA membuat judul berita *Di bawah Guyuran Hujan Lebat: Lahan Calon Bandara Dikosongkan* dengan menampilkan aktor narasumber dari pihak *stakeholder* saja, sedangkan warga penolak dan tidak menampilkan sudut pandang lain dalam pengosongan lahan tersebut. Sedangkan Harjo pada tanggal 28 November 2017 memberitakan pengosongan lahan tersebut dengan judul *PT AP I Kosongkan Paksa Rumah Warga*, sama dengan KR hanya memunculkan satu tokoh *stakeholder* saja. Namun yang membedakan dengan KR adalah pada hari berikutnya yaitu tanggal 29 November 2017, Harjo memberitakan pengosongan lahan dengan judul *Warga Ngotot Tak Akan Pindah* dengan memunculkan aktor penolak NYIA menuturkan persisnya kejadian pengusuran paksa yang represif tersebut.

Salah satu warga penolak yang rumahnya sudah dibongkar, Fajar Ahmadi menuturkan, PT AP I telah menggunakan alat berat untuk merobohkan tanaman dan memotong akses jalan menuju rumahnya. Selain itu ada tiga pintu dan 11 daun jendela yang sudah dicongkel serta dilepas paksa. Ia menyayangkan sikap PT AP I beserta aparat kepolisian, PT PLN dan Pemkab Kulonprogo yang tetap melakukan pengusuran. (Rabu, 29 November 2017)

Kedua, tindakan represif yang terjadi ketika pembersihan lahan pada hari Senin, 4 Desember 2017. SKH KR memberitakan kejadian tersebut dengan judul *Ada Aksi Menolak Bandara: Tak Ganggu Pembersihan Lahan* yang terbit pada Selasa, 5 Desember 2017. Pada berita tersebut KR hanya memunculkan aktor dari PT AP I dan Kapolres Kulon Progo saja. Pihak penolak tidak diberikan tempat untuk menyampaikan suara mengenai pengosongan lahan tersebut. Berbeda dengan SKH KR, dalam memberitakan pengosongan lahan tanggal 4 Desember 2017 Harjo memberitakannya dengan judul *Ponirah Pertahankan Bumi Glagah*. Berita tersebut memunculkan tiga narasumber dari warga penolak NYIA yang tetap bertahan di daerah

terdampak NYIA beserta alasan mereka menolak pembangunan NYIA.

Tindakan aparat terhadap kelompok penolak tidak hanya pada warga saja, melainkan juga kepada para aktivis. Bahkan para aktivis ditangkap dan sempat diamankan oleh pihak polisi. Mengenai hal tersebut Nasir Jamil, Anggota DPR Komisi III menilai tindakan tersebut menggunakan cara orba. Sebagaimana yang diketahui orde baru menggunakan cara-cara yang represif selama rezim tersebut berkuasa, namun ironinya pada masa reformasi masih terjadi hal tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Djamil menilai penangkapan 12 aktivis jaringan solidaritas penolak pembangunan Bandara Kulon Progo oleh aparat kepolisian hari ini, Selasa (5/12/2017) seperti pada masa Orde Baru (Orba) yang represif.

"Menurut saya cara seperti itu adalah cara Orba itu. Cara menangkap aktivis itu kan cara Orba. Cara yang tidak bisa menyelesaikan masalah," kata Nasir saat dihubungi Tirto, Selasa, (5/12/2017). (Tirto, 5 Desember 2017)

Ketiga, tindakan represif yang terjadi ketika pengosongan lahan pada tanggal 8 Januari 2018. Hal tersebut dipicu oleh pengerusakan lading cabe milik salah seorang warga penolak yang belum menyerahkan lahannya untuk bandara. Akibatnya terdapat 5 korban dari warga yang menjadi sasaran pukulan aparat. Bahkan, hingga terjadi pendarahan.

Teguh mencatat, setidaknya ada 5 warga yang menjadi sasaran pukulan aparat saat kericuhan terjadi. Dua warga sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit di kawasan Temon, tapi sudah pulang pada hari ini.

"Satu warga terluka dan berdarah mulutnya karena kena tonjok, satu lagi sakit di bagian telinga," kata Teguh.

Warga yang terluka dan berdarah di bagian mulutnya ialah Suyadi (39). Ia sempat terkapar usai terkena pukulan. "Dia sempat juga terinjak-injak, karena situasinya ramai dan ricuh," kata Teguh. Teguh mendesak kepolisian mengusut keterlibatan anggotanya dalam insiden kericuhan hari ini. "Kalau perlu diberi sanksi," kata dia. (Tirto, 8 Januari 2018)

Terkait hal tersebut SKH KR memuat dua berita yang berjudul *Pembersihan Lahan NYIA Diwarnai Ketegangan dan Kuasa Hukum Warga Penolak Bandara: Minta Pemkab selesaikan Konflik* yang terbit pada 9 Januari 2018. Pada berita pertama KR hanya memunculkan satu narasumber pro pembangunan NYIA yaitu dari pihak PT AP I. Pada berita selanjutnya KR memunculkan aktor pendukung NYIA yaitu Bupati Kulonprogo, pihak PT AP I dan pihak kepolisian. Selain itu KR juga memunculkan tokoh penolak NYIA sejumlah 3 narasumber. Sama halnya dengan KR, Harjo juga membuat berita pada tanggal 9 Januari 2018 dengan judul *Gara-Gara Pohon, Land Clearing Tegang*. Pada berita tersebut Harjo memunculkan 4 narasumber dari pihak warga penolak NYIA dan satu narasumber.

b. Maladministrasi dalam Pembangunan NYIA

Dalam kurun waktu 25 November 2017 – 25 Januari 2018, terjadi maladministrasi dalam pembangunan NYIA, terutama dalam hal pemberian Surat Peringatan (SP), dan pemutusan listrik. Dugaan maladministrasi tersebut diinvestigasi oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY dalam pemberitaan tentang dugaan maladministrasi tersebut Harjo memberitakan hal tersebut dengan judul *Warga Tolak Surat Peringatan* yang terbit pada tanggal 9 Desember 2017 dan *ORI DIY Kaji Dugaan Maladministrasi* yang terbit pada tanggal 13 Desember 2017. Dalam pemberitaan dikedua berita tersebut, Harjo memunculkan narasumber dari ORI DIY yaitu Muhammad Rifky, menurutnya ORI sudah melakukan klarifikasi terhadap PLN, Kepolisian, dan pemerintah daerah (pemda) daerah terkait, meskipun masing-masing pihak tidak mengakui adanya kesalahan prosedur.

Ombudsman Republik Indonesia (DIY) sudah melakukan klarifikasi kepada PLN, Kepolisian, dan pemerintah daerah terkait dengan laporan pengosongan paksa di lahan bandar Kulonprogo. Hasilnya, upaya fisik yang dilaporkan ada yang tidak diakui oleh kepolisian. Muhammad Rifky, asisten ORI DIY mengatakan konfirmasi juga dilakukan terkait dengan indikasi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengosongan paksa. "Soal upaya fisik, dari berita yang beredar di media dan dari keterangan pelapor, sebagian diakui terjadi,"

ujarnya kepada Harian Jogja, Jumat. Polsek Temon sendiri menyanggah tuduhan soal memborgol, memukul dan menyeret warga maupun mahasiswa. Namun, untuk aksi menarik dan dorong-dorongan dengan warga dan mahasiswa diakui dilakukan demi tujuan pengamanan proses tersebut. Selain itu, laporan yang masuk juga menyinggung adanya pemutusan listrik di lokasi yang kini masih dihuni sejumlah warga penolak bandara itu. Rifky mengatakan dari pihak PLN menerima surat permintaan pemutusan listrik dari Angkasa Pura I. (Harjo, 13 Desember 2017)

Mengenai kejadian tersebut, SKH KR memilih untuk tidak memberitakan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh PT AP I dan jaringan kekuasaan yang dimilikinya. Pada hari yang sama yakni pada tanggal 9 dan 13 Desember 2017 SKH KR tidak menerbitkan berita tentang pembangunan NYIA, berbeda dengan KR yang memberitakan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh *stakeholder*.

5. Relasi Makna Antarunsur Wacana

Konflik NYIA merupakan konflik yang terjadi antara pelaksana pembangunan dengan warga penolak NYIA. Dalam konflik ini ada perbedaan kekuatan yang besar antara PT AP I dengan warga penolak NYIA. PT AP I yang didukung konstelasi kekuatan besar yang terdiri dari para *stakeholder* yaitu penguasa tertinggi negara hingga instansi-instansinya beserta para aparatnya. Sedangkan warga penolak NYIA hanya terdiri dari sekelompok warga dibantu dengan segelintir aktivis mahasiswa.

Perbedaan dua kekuatan tersebut berujung kepada tertindasnya kelompok yang lemah, dalam hal ini warga penolak NYIA. Untuk memuluskan proyek pembangunan NYIA pihak pelaksana menggunakan segala macam cara, termasuk tindakan represif. Tindakan represif tersebut berjalan dengan menggunakan aparat negara. Menurut Marx (2009: 4) aparat negara merupakan 'komite' untuk mengatur urusan seluruh borjuasi, melanggengkan kekuasaan, mempercepat dan memperkuat proses kapitalisasi dan memindas atas nama kepentingan kaum borjuis. Althusser (2015:19) juga menambahkan bahwa aparat negara memiliki kekuatan intervensi dan

pelaksana represi untuk 'kepentingan kelas yang berkuasa', dalam perjuangan kelas yang dilakukan oleh borjuasi dan sekuatunya melawan proletariat.

Selanjutnya Althusser (2015: 24) menyebut aparaturnegara sebagai 'aparaturnegara represi negara/ *repressive state apparatus*'. Karena menurutnya aparaturnegara 'berfungsi dengan kekerasan' yang tidak hanya berbentuk represi fisik namun juga non-fisik seperti represi administrasi, ekonomi dan sebagainya.

Teori aparaturnegara represi milik Louis Althusser sesuai dengan realita yang ada pada konflik bandara Kulon Progo atau NYIA. Pihak PT AP I menggunakan aparat negara, seperti polisi, militer dan PLN untuk memuluskan proyek NYIA. Warga penolak dianggap sebagai penghambat pembangunan NYIA yang ditargetkan beroperasi pada April 2019. Tindakan represif aparat negara terhadap warga penolak NYIA berupa pengosongan paksa lahan calon bandara, kekerasan fisik terhadap warga penolak dan aktivis, pengamanan dan penangkapan aktivis penolak NYIA, serta pemutusan jaringan listrik di rumah-rumah warga penolak.

Proses pembangunan NYIA melibatkan mekanisme kekuasaan agar bisa terealisasi. Secara hierarki bentuk mekanisme kekuasaan tersebut berupa disiplin, normalisasi dan kontrol (Eriyanto. 2011: 69-71). Disiplin artinya aturan, prosedur, jadwal, pelaksanaan dan tujuan kegiatan yang menghasilkan kegiatan. Normalisasi merupakan bentuk pemisahan antara individu atau kelompok satu dengan yang lainnya. Kontrol bermakna memberi ganjaran bagi yang mengikuti dan memberikan hukuman bagi yang melanggar, sehingga setiap individu berusaha untuk mematuhi aturan-aturan dari penguasa.

Mekanisme disiplin dalam pembangunan NYIA berupa adanya surat peringatan (SP) kepada warga penolak yang berisikan peringatan untuk meninggalkan lahan hunian warga penolak sebelum tengat waktu yang ditentukan. Mekanisme selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi merupakan pemisahan individu satu dengan yang lainnya. Mekanisme normalisasi pada pembangunan NYIA terjadi pada warga penolak diantaranya pengamanan aktivis, pilih kasih PT AP I dalam menerima massa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok penolak NYIA.

Kontrol merupakan mekanisme lanjut dari disiplin dan normalisasi. Kontrol bermakna memberi ganjaran bagi yang mengikuti dan memberikan hukuman bagi yang melanggar, sehingga setiap individu berusaha untuk mematuhi aturan-aturan dari penguasa. Dalam pembangunan NYIA setelah pendisiplinan dan kegiatan normalisasi, mekanisme kontrol bekerja sebagai hukuman bagi pihak penolak yang tidak mengikuti aturan dari penguasa dalam hal ini pemerintah beserta jaringan kekuasaannya. Hukuman tersebut berupa penggusuran paksa, kekerasan fisik, dan pemutusan jaringan listrik yang termasuk dalam tindakan represif.

6. Kontekstualisasi Wacana dengan Jaringan Kekuasaan

Wacana tentang NYIA merupakan wacana yang kerap kali ditampilkan oleh media, terutama media lokal SKH *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja*. Kedua media tersebut kerap memberitakan NYIA dengan intensitas yang cukup tinggi. Media-media tersebut memiliki rubrik untuk wilayah Kulon Progo, Kabupaten dimana NYIA akan dibangun. Wacana NYIA selalu menarik untuk perhatian publik terutama konflik antara pendukung NYIA dan penolak NYIA. Pihak pendukung NYIA terdiri dari pemerintah mulai dari struktur teratas yakni presiden hingga ketingkat bawah beserta instansi atau organisasi pendukung pembangunan NYIA. Sedangkan pihak penolak hanya terdiri dari warga penolak yang didukung oleh beberapa aktivis penolak NYIA. Konflik NYIA semakin meruncing dengan adanya tindakan represif aparat negara kepada warga penolak NYIA. Demi memuluskan berjalannya proyek NYIA, *stakeholder* melakukan tindakan – tindakan represif kepada warga penolak NYIA yang menolak pembangunan dan menyerahkan lahan mereka.

Dalam memberitakan tindakan represif aparat terhadap warga penolak NYIA SKH *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja* memiliki cara masing-masing. *Kedaulatan Rakyat* memberitakan tindakan represif dengan jumlah yang lebih sedikit dari Harjo, dan lebih banyak menyoroti percepatan pembangunan ketimbang tindakan represif aparat negara terhadap aparat negara. Selain itu, dari pengambilan narasumber *Kedaulatan Rakyat* memberi ruang sempit bagi warga penolak jika dibandingkan dengan *Harian Jogja*.

Dalam narasi besar pembangunan NYIA, terdapat beberapa unsur yang oleh *Kedaulatan Rakyat* memilih untuk ‘diam’ dan menyembunyikannya. Unsur-unsur yang didiamkan dan disembunyikan tersebut adalah tindakan represif aparat selama proses pengosongan lahan, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kehadiran NYIA, dugaan maladministrasi dalam proses pembangunan NYIA, dan sengketa transparansi informasi publik. Berbeda dengan *Kedaulatan Rakyat*, *Harian Jogja* memberitakan unsur – unsur tersebut.

Konstruksi dalam pemberitaan tentang NYIA dan khususnya tindakan represif aparat kepada warga penolak KR memilih memberitakan berita secara positif dari sudut pandang *stakeholder*. Hal ini dikarenakan KR memiliki relasi kuasa dengan penguasa. Hal ini diperkuat dengan pendapat Foucault (2002: 175) bahwa relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis relasi lain (produksi, kekerabatan, keluarga, seksualitas) dimana mereka memainkan sekaligus berperan dalam pengkondisian dan yang terkondisikan. Dalam jajaran redaksi KR, HM Idham Samawi menjabat sebagai Penasihat sekaligus memainkan peran sebagai aktor politik karena menjabat sebagai petugas partai dari PDI-P dan menjadi anggota DPR RI. Jika ditelusuri lebih jauh lagi PDI-P merupakan partai pemilu 2014 yang mana Presiden pemenang pemilu berasal dari partai tersebut dan memiliki beberapa proyek strategis nasional, salah satunya *New Yogyakarta International Airport* (NYIA). Penggunaan *Kedaulatan Rakyat* untuk hal-hal politis tidak hanya dalam NYIA saja, contoh lain misalkan untuk pemenangannya selama dua periode di pemilu dan citra positifnya mengenai dana BOS, serta pemenangan Sri Surya Widayati sebagai Bupati Bantul periode 2010-2015 (Rossew, 2011: 32). Hal ini mengindikasikan bahwa KR melalui keterlibatan peran Idham Samawi memiliki relasi kuasa berupa kedekatannya dengan penguasa yang berkepentingan dalam pembangunan NYIA.

Menurut Foucault (2002: 44) ada dua cara yang dilakukan oleh penguasa untuk menguasai *public discourse* yakni kekuasaan akan informasi atau pengetahuan kebenaran dan kekuasaan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan. Berita dan informasi dicari, didapat lalu disusun dengan

lihat oleh intelejen dan staf-staf ahlinya. Kemudian, informasi tersebut didistribusikan melalui jaringan-jaringan kekuasaannya, salah satunya melalui media untuk membentuk kebenaran dan opini publik versi penguasa. Sehingga terjadi monopoli informasi dalam wacana publik oleh penguasa. Pendapat Foucault relevan dengan apa yang terjadi dengan *Kedaulatan Rakyat*. Wacana yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakyat* mensiratkan wacana penguasa karena lebih berpihak kepada penguasa. Wacana menurut Foucault (2002: 23) digunakan untuk mengkonstruksi pemaknaan dan pola pikir dominan, lalu memberangus pola pikir alternatif pada suatu periode. Sehingga, *Kedaulatan Rakyat* memiliki peran yang penting bagi penguasa karena dapat mempengaruhi khalayak dengan wacana penguasa dan memberangus wacana yang tidak sejalan dengan penguasa. Ditambah KR memiliki pembaca terbanyak diantara media massa lain di lingkup lokal yakni DIY. Dampaknya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara akan dibenarkan oleh masyarakat DIY melalui wacana yang disebarkan oleh *Kedaulatan Rakyat*.

Berbeda dengan *Kedaulatan Rakyat*, Harjo muncul sebagai media alternatif yang baru menjajaki dunia media massa. Berita Harjo terkait pemberitaan NYIA khususnya tindakan represif aparat memiliki narasi pemberitaan yang berbeda dengan KR. Narasi yang dibentuk banyak melibatkan sudut yang berbeda dari wacana pemberitaan media massa *mainstream*. Selain itu, Harjo tidak memiliki keterikatan politik dengan penguasa yang ada. Sehingga Harjo lebih netral dan bebas dalam memberitakan wacana pembangunan NYIA khususnya tindakan represif aparat kepada warga penolak NYIA.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah konstruksi pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak NYIA di koran KR memihak kepada penguasa dan tindakan-tindakan represifnya kepada warga penolak. Warga penolak pembangunan NYIA dikonstruksi bersalah karena menghambat pembangunan NYIA, sedangkan aparat yang bertindak represif dimaklumi dan dihalakan untuk mempercepat pembangunan NYIA. Konstruksi KR memihak pada *stakeholder*, dari

porsi pemberitaan terhadap *stakeholder* lebih dominan dan memberikan ruang sempit bagi warga penolak NYIA untuk menyuarakan apa yang dialami oleh mereka. Hal ini dikarenakan *Kedaulatan Rakyat* merupakan relasi kuasa yang dimiliki oleh penguasa saat ini. Jaringan kekuasaan tersebut menjadikan *Kedaulatan Rakyat* corong bagi penguasa termasuk memberitakan dan menyebarkan wacana milik penguasa.

Sedangkan konstruksi pemberitaan tindakan represif aparat terhadap warga penolak pada koran *Harian Jogja* memihak kepada warga penolak pembangunan NYIA jika dibandingkan dengan *Kedaulatan Rakyat*. *Harjo* mengkonstruksi bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat telah melanggar hak-hak kemanusiaan dan melanggar administrasi serta hukum yang berlaku. Konstruksi *Harjo* tersebut dikarenakan *Harian Jogja* sebagai media massa lokal baru atau alternatif yang tidak terikat dengan jaringan kekuasaan. Sehingga, *Harian Jogja* berusaha memberikan wacana alternatif selain wacana bentukan penguasa. Sehingga *Harian Jogja* memihak kepada warga penolak NYIA dalam memberitakan tindakan represif aparat terhadap warga penolak NYIA.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)*, Indoprogres.
- Badara, Anis. (2014). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. (2014). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta. Kencana.
- Chandra, et al. (2014). *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Company Profile. *Kedaulatan Rakyat*: 2015
- Company Profile. *Harian Jogja*: 2009
- Efendi, David. (2018). *Lokalisasi Demokrasi: Politik Identitas dalam gerakan Keistimewaan di Yogyakarta Pasca Orde baru, 2003-2012*. Yogyakarta: UMY
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKIS Yogyakarta.

- Foucault, Michel. (2002). *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Michel Foucault*. Yogyakarta. Jalasutera.
- Foucault, Michel. (2002). *Power/Knowledge Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault, Michel. (2016). *Bengkel Individu Modern. Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS.
- Giddens, Anthony. (1985). *The Nation-State And Violence*, Cambridge: Polity Press.
- Marx, Karl, & Engels, F. (2009). *Manifesto Partai Komunis*. Rowland Literature.
- Pranoto, C., Bregas. (2017). *Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta*. *Jurnal Politik*, 3, 1-31.
- Rossey, Andrew. (2011). *Leaders, Elites and Coalitions: The Politics of Free Public Services in Decentralised Indonesia*. The Developmental Leadership Program.
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wetherell, Margaret, et al. (2001). *Discourse as Data A Guide for Analysis*. London: Sage Publications.

Koran:

- 33 Rumah Masih Tetap Berdiri. (6 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Ada Aksi Menolak Bandara. Tak Ganggu Pembersihan Lahan. (5 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Aksi Tolak Bandara, Jalan Solo Macet. (10 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Angkasa Pura Berharap Warga Dukung Bandara. (13 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Anggota Komisi III DPR: Penangkapan Aktivis Penolak Bandara Kulon Progo Pakai Cara Orba. (5 Desember 2017). *Tirto.id*
- AP I Enggan Jamin Kondisi Warga. (2 Januari 2018). *Harian Jogja*.
- Di Bawah Guyuran Hujan Lebat: Lahan Calon Bandara Dikosongkan. (28 November 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Diawali Proses Gali dan Urug, PT PP Mulai Pembangunan Fisik NYIA. (24 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Disayangkan Masih Ada Pembersihan Lahan, Pembangunan NYIA Proyek Strategis

- Nasional. (25 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Dukung Percepatan Pembangunan NYIA: GBS Gelar Aksi Damai. (12 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Komnas HAM Temui Warga Penolak NYIA. (18 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Komnas HAM Tunggu Sikap Warga Penolak Bandara: Warga 5 Desa Terdampak Gelar Pesta Rakyat. (18 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Kuasa Hukum Warga Penolak Bandara: Minta Pemkab Selesaikan Konflik. (9 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Land Clearing Ubah Habitat Burung. (14 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Optimis Beroperasi 2019, Pembangunan NYIA Gunakan Pendekatan Persuasif. (11 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- ORI DIY Kaji Dugaan Maladministrasi. (13 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Pembangunan NYIA Diakselerasikan: Warga Yang Bertahan Diimbau Segara Pindah. (3 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Pembersihan Lahan Capai 97%. (5 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Pembersihan Lahan NYIA Diwarnai Ketegangan. (9 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Pemkab Sayangkan Penolakan Warga. (16 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Pengosongan Lahan Belum Dipastikan Hari Ini AP Layangkan SP III. (14 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Polemik Selesaikan Dengan Musyawarah, AP Tetap bangun Infrastruktur Publik NYIA. (20 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Proses Land Clearing Bandara: Polisi Amankan Empat Aktivist Diduga Provokator. (10 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- PT AP I Hentikan Sementara Land Clearing. (11 Januari 2018). *Harian Jogja*.
- PT AP Libatkan Polwan. (2 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- PWPP-KP Masih Enggan Berdialog: Tahapan Pembangunan NYIA Jalan Terus. (6 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Soal Pengosongan Bandara, Sultan: "Mosok kudu dipeksa". (4 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- SP III Segera Dilayangkan. (12 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- SP Ketiga Sudah Dilayangkan, Tak Diindahkan AP I Akan Gusur Paksa. (27 November 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Sukarelawan Diminta Ikut Beri Solusi Nyata. (15 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Sultan Berharap Warga Pindah Sukarela. (4 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- Tim Percepatan Pembangunan NYIA, Proses Konsinyasi Ganti Rugi Lahan Lancar. (23 Januari 2018). *Kedaulatan Rakyat*.
- Upaya Sambung Rasa Tak Berjalan Mulus: Sujiastono: Hanya 1% Warga Penolak Bandara. (16 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Usaha Pengosongan Lahan Bandara Kulon Progo Kembali Ricuh (8 Januari 2018). *Tirto.id*.
- Warga Ngotot Tak Akan Pindah. (29 November 2017). *Harian Jogja*.
- Warga Terdampak Bandara Gelar Pesta Rakyat. (16 Desember 2017). *Harian Jogja*.
- WTT Nilai Angkasa Pura I: Terkesan Lambat Eksekusi Pengosongan Lahan. (22 Desember 2017). *Kedaulatan Rakyat*.
- Website:**
- Lipi.go.id, *Temuan LIPI Perkuat Bukti Pembangunan Bandara Kulon Progo di Kawasan Rawan Bencana* diakses dari <http://lipi.go.id/lipimedia/temuan-lipi-perkuat-bukti-pembangunan-bandara-kulon-progo-di-kawasan-rawan-bencana/18710/> pada Selasa, 20 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.
- HarianJogja.com, *Tentang Kami*, diakses dari <http://www.harianjogja.com/page/tentang-kami/> pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 18.30 WIB.
- KRjogja.com, *TentangKami*, diakses dari <http://KRjogja.com/web/pages/content/tentangKami/> pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 18.45 WIB.
- KPPIP.go.id, *Pembangunan Baru Bandara Internasional di Propinsi D.I. Yogyakarta*, diakses dari <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/c-sektor-bandar-udara/pembangunan-baru-bandara-internasional-d-i-yogyakarta/> pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.
- BPS.go.id, *Januari 2018, Nilai Ekspor Indonesia Mencapai US\$14,46 Miliar dan Nilai Impor Indonesia Mencapai US\$15,53 Miliar*, diakses dari <https://>

www.bps.go.id/pressrelease/ 2018/ 02/ 15/ 1497/ januari – 2018 - nilai-ekspor-indonesia-mencapai-us-14-46-miliar - dan-nilai-impor-indonesia-mencapai-us-15-13-miliar/ pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 09.30 WIB.

Konstitusi:

TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang *Garis Besar Haluan Negara*.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang *Penerbangan*.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY*.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Tindakan
Represif Aparat terhadap Warga Penolak
Pembangunan NYIA di Koran *KR* dan *Harjo*
Nama : Yasyfi Kunsuhuan Adi
NIM : 14419144037
Program Studi : Ilmu Komunikasi



Reviewer,

Yogyakarta, 26 November 2018
Pembimbing,

Dyna Herlina Suwanto, M.Sc.
NIP. 19810421 200501 2 001

Benni Setiawan, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830329 201504 1 001

Rekomendasi Pembimbing (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke *Journal Student*
2. Dikirim ke *Jurnal Informasi*
3. Dikirim ke jurnal lain